

Partai Pelita Merapat ke AMIN

JAKARTA (KR) - Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) libur kampanye, Minggu (10/12). Langkah ini dilakukan, untuk mempersiapkan debat capres-cawapres perdana yang akan diselenggarakan di Kantor KPU, Selasa (12/12). Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenuhan AMIN, Muhammad Syaugi Alaydrus, mengatakan, Anies dan Muhaimin melakukan persiapan, baik sebelum kampanye maupun debat pilpres. "Sekarang mempersiapkan debat," kata Syaugi. Pada bagian lain, Muhammad Syaugi, mengatakan dukungan terhadap pasangan AMIN terus berdatangan dan menambah keyakinan paslon nomor 1 ini memenangi Pilpres 2024. "Timnas AMIN menyambut baik. Mudah-mudahan dengan dukungan tersebut menambah

keyakinan kami untuk dapat memenangkan Pilpres 2024," kata Syaugi. Menurutnya dukungan terhadap pasangan AMIN terus berdatangan, yang terbaru yaitu dari Partai Pelita dan Relawan Pelita Perubahan. Anies dan Muhaimin libur kampanye pada hari ke-13 masa kampanye Pilpres 2024, Minggu. Setelah sebelumnya berkampanye di Jabar dan Sumatera Utara, Sabtu (9/12), Minggu kemarin keduanya hanya mengikuti kegiatan internal. Syaugi memastikan Anies dan Muhaimin merupakan tokoh yang taat aturan, dalam hal ini peraturan KPU diikuti oleh Anies-Muhaimin. Syaugi juga berharap acara debat bisa membuat masyarakat mengetahui kemampuan dari masing-masing capres dan cawapres. (Ant)-f

Prabowo Berpihak pada Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani mengatakan, pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 itu akan memanfaatkan jabatannya untuk berpihak kepada ekonomi kerakyatan apabila terpilih memenangi Pilpres 2024. "Inilah yang diharapkan ekonomi Indonesia tambah kuat dan bangkit pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah mendukung dan memberi fasilitas kepada mereka. Jabatan Pak Prabowo sebagai presiden (jika terpilih) akan digunakan untuk membantu mereka yang kecil dan lemah," kata Muzani saat menghadiri acara deklarasi warga Tegai di Gedung Joang '45, Jakarta, Minggu (10/12). Muzani menambahkan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program penguatan usaha mikro, kecil

dan menengah (UMKM). Apalagi, selama ini kontribusi UMKM dianggap sebagai tiang penyangga ekonomi nasional. Melalui program tersebut, Prabowo-Gibran menawarkan kemudahan akses perluan pasar dan permodalan, termasuk fasilitas kredit yang mudah dan murah khusus untuk UMKM. Program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran pun, nantinya secara tidak langsung akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi lokal, selain membawa misi utama terhadap peningkatan gizi anak dan remaja. "Penyedia sayur, beras, minyak, telur, daging, susu, itu diharapkan disediakan dari kawasan sekitar, termasuk mungkin dari warteg, tetapi ini belum sampai (dibicarakan), harapannya, ekonomi lokal bisa tumbuh berkembang setiap hari pada hari-hari sekolah," jelas Muzani. (Ant)-f

Komitmen Ganjar-Mahfud Berantas KKN

LEBAK (KR) - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen meningkatkan sumberdaya manusia hingga memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air, jika terpilih memenangi Pilpres 2024. Dalam safari politik dan konsolidasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lebak Banten, Minggu (10/12), Hasto mengatakan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 itu memastikan kelanjutan program Satu Sarjana Satu Rumah Tangga, perbaikan lapangan pekerjaan, hingga pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Komitmen Ganjar Pranowo-Mahfud MD meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan, perbaikan lapangan pekerjaan, dan pemberantasan KKN," kata Hasto di Gedung As-Sakinah Kabupaten Lebak.

Hasto menyebutkan, program Satu Sarjana Satu Rumah Tangga bisa menjadi solusi dalam upaya meningkatkan SDM unggul di Indonesia. Menurutnya, program tersebut telah dilakukan Ganjar Pranowo saat ia menjadi Gubernur Jateng selama dua periode. Selama ini, lanjut Hasto, Ganjar-Mahfud menyadari betul, pemberantasan tindak pidana korupsi sangat berkaitan dengan kualitas pendidikan. "Kami tahu pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan kualitas pendidikan. Pak Ganjar juga bukan hanya menjanjikan, tetapi beliau sudah membuktikan di Jateng," jelasnya. Ia menambahkan, Mahfud MD adalah sosok yang sarat pengalaman dengan rekam jejak bersih. "Jadi, soal pemberantasan korupsi, yang paling kredibel adalah Prof Mahfud MD," tegasnya. (Ant)-f

Angka

terus-menerus," kata peneliti SETARA Institute Sayyidatul Insiyah di kawasan Menteng Jakarta, Minggu (10/12). Insiyah menjelaskan, saat ini negara mencoba membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan cara-cara yang lebih halus. "Seolah-olah demokrasi, padahal sebenarnya di dalamnya juga melakukan pemberangusan. Misalnya, berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen mulai 2006 hingga 2023, kriminalisasi terhadap jurnalis atau kebebasan pers itu paling banyak ditemukan pada era pemerintahan Jokowi," katanya. Berdasarkan data tersebut, Insiyah menyebutkan, terjadi 84 kasus represif terhadap jurnalis pada tahun 2020. Sebelumnya, jumlah kasus tidak pernah mencapai angka 80 pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mengatakan, faktor penyebab rendahnya angka kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan haknya hingga pembatalan diskusi. "Kita tahu, beberapa diskusi-diskusi yang diadakan masyarakat atau teman-teman mahasiswa di lingkungan kampus kemudian dibatalkan secara sepihak oleh kampus atau rektorat," ujarnya. Indeks HAM SETARA bersama INFID menggunakan studi pengukuran yang basis utamanya adalah disiplin HAM dan

menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban, sedangkan warga negara sebagai pemegang HAM. Data Indeks HAM diperoleh dari laporan kinerja lembaga negara, laporan organisasi masyarakat sipil, hasil riset lembaga penelitian, data pemantauan SETARA Institute dan referensi media. Data tersebut selanjutnya diolah menjadi narasi yang mendeskripsikan capaian negara dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM. Penilaian ini menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7. Nilai 1 menggambarkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM paling buruk, sedangkan nilai 7 menunjukkan komitmen pemenuhan HAM paling baik. Penilaian tersebut menggunakan triangulasi sumber dan penilaian profesional sebagai instrumen justifikasi temuan studi. Pada bagian lain lembaga ini juga mengungkapkan, indeks hak asasi manusia (HAM) 2023 atau menjelang satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami stagnansi. Peneliti SETARA Institute Sayyidatul Insiyah mengatakan, indeks HAM 2023 adalah 3,2 atau sama dengan indeks HAM 2019 yang merupakan akhir pemerintahan Jokowi periode pertama. "Jika dibandingkan dengan satu periode pada tahun 2019, angkanya stagnan 3,2

atau tidak ada progres yang signifikan walaupun angkanya fluktuatif terjadi sedikit peningkatan dan penurunan. Tetapi, pada akhirnya tidak ada progres yang signifikan terkait dengan kemajuan HAM pada tahun ini," papar Insiyah. Insiyah mengatakan, indeks HAM 2023 mengalami penurunan dari 2022 yang mencapai angka 3,3. Bahkan, indeks HAM 2023 berada di bawah angka moderat, yakni 3,5. Selain itu, ia menjelaskan, indikator hak sipil dan politik (sipol) mencapai skor 3 atau turun 0,1 dibandingkan 2022 yang tercatat 3,1. "Satu hal yang bisa kita highlight adalah bagaimana penerangan ruang-ruang sipil yang memengaruhi pencapaian terkait dengan hak sipil yang selalu jauh dari angka moderat dan selalu rendah dari hak ekosos (ekonomi, sosial dan budaya)," katanya. Ia lantas menyebutkan hak sipil meliputi hak hidup, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak turut serta dalam pemerintahan serta kebebasan berekspresi dan berpendapat. Indikator hak ekosos, lanjut Insiyah, meraih skor 3,3 atau menurun dibandingkan skor 2022 yang mencapai 4,3. Hak ini meliputi hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak atas tanah dan hak atas budaya. (Ant)-f

Sambungan hal 1

Komika

termasuk seperti yang dilakukan Aulia Rakhman di Lampung. "Dan pre-event itu diperlukan untuk ice breaking atau pencair suasana sebelum Pak Anies datang," katanya. Menurut Billy, pihak Timnas AMIN pun tetap menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Kasus itu juga menjadi

evaluasi bagi pihaknya untuk lebih selektif dalam melakukan kurasi materi guna menghindari kejadian serupa. "Namun, Timnas AMIN tetap memberikan keleluasaan bagi para komika atau pendukung acara lain buat mempersiapkan kontennya," tambahnya. (Ant/Has)-f

Sambungan hal 1

Ada

pengungsi Rohingya dan meminta masyarakat untuk bersabar. "Nah, kita akan menyelesaikan masalah sosial-politiknya, itu kan masalah kemanusiaan. Orang sudah keluar karena diusir oleh negara sendiri misalnya Rohingya, diusir dari Rohingnya, Malaysia tidak mau terima, Australia tidak mau terima," katanya. Ditambahkan, pemerintah juga akan mengusahakan penanganan kebutuhan domestik dan kemanusiaan sehingga dapat terlaksana dengan baik. "Kita akan memperhitungkan ba-

gaimana cara memberi arti kemanusiaan terhadap pengungsi-pengungsi ini. Karena negara-negara lain pada menolak malah dibuang ke tempat kita semua," ujarnya. Mahfud menambahkan, hingga saat ini pemerintah belum memikirkan soal pemberian pulau untuk dijadikan lokasi pengungsian bagi warga Rohingnya. "Kita belum memikirkan satu pulau, tetapi kita tetap akan memberikan tempat penampungan sementara," pungkasnya. (Ant/Has)-f

Sambungan hal 1

Butet:

Merespons unggahan Butet, Kapolda memerintahkan anak buahnya bekerja mulai pukul 11.00 sampai malam. Selain itu juga kawankawannya ahli komunikasi. Bahkan Menko-info memerintahkan Telkomsel untuk meneliti. Butet berharap, pelayanan yang baik dari berbagai pihak itu tak hanya untuk dirinya. "Saya berharap pelayanan yang baik ini tak hanya ketika Butet yang mengalami. Semua harus dilayani oleh semua instrumen negara," harap Butet. Terkait terganggunya ponsel dan aplikasi WA milik budayawan Butet tersebut, Polda DIY memang menurunkan tim gabungan untuk mela-

kukan penyelidikan. "Respons cepat Polda DIY ini merupakan salah satu tugas polisi terhadap aduan masyarakat," tutur Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Nugroho Arianto SIK MH. Dijelaskan sejak Sabtu (9/12) tim gabungan Ditreskrim dan Ditreskrimsus melakukan penyelidikan. Ditemukan nomor WA Butet terhubung dengan device lain. Kejadian ini merupakan illegal access terhadap aplikasi Whatsapp pada ponsel Butet yang bisa disalahgunakan. "Polda DIY akan menindaklanjuti permasalahan ini hingga tuntas," tegas Nugroho. (Vin/Ewp)-f

Sambungan hal 1

Mendes:

masyarakat. "BAHU ini berfokus pada literasi, mitigasi, dan litigasi hukum serta dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau asosiasi pengacara hukum. Sehingga, aparat desa bisa berhati-hati atau aparat desa bisa lebih tepat dalam menggunakan Dana Desa dan tata kelola aset dan se-

bagainya," katanya. Ia berharap melalui BAHU permasalahan di desa dapat diidentifikasi, ditangani, dan dimitigasi dengan baik. Menurutnya, tujuan utama SPU adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Indonesia Timur.

"Terima kasih pada tim yang sudah mengelaborasi tugas-tugas yang sebenarnya hanya di Indonesia Timur, akhirnya dibawa ke Jombang, Jember, Madiun, dan lainnya dengan berpikir untuk kepentingan pembangunan desa secara umum," katanya. (Ant/San)-f

Sambungan hal 1

Ilmu

(dan tentu berharap bisa memastikan) berbagai hal yang akan terjadi di masa depan. Kesulitan utama yang sulit diatasi adalah kebanyakan ilmu sosial terikat dengan berbagai kepentingan dan tujuan dalam berbagai relasi kuasa. Dengan demikian, kegagalan awal ilmu sosial adalah ketidakmampuannya membebaskan dirinya dalam kepentingan kekuasaan. Memang, sebenarnya tidak ada masalah jika ilmu sosial terikat dalam berbagai kepentingan dan tujuan. Sebagai misal, keberpihakan ilmu sosial untuk membantu mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai kejahatan. Dalam hal ini, ilmu sosial memang dituntut memiliki kepentingan dan tujuan membela pihak yang menjadi korban. Dalam cara itu, ilmu sosial secara subjektif bisa menginggr opini dan membangun kesadaran baru bagaimana ke depan bersikap terhadap ketidakadilan, kemiskinan, dan berbagai kejahatan lainnya. Berdasarkan data-data objektif, dengan kerangka teori dan metodologi yang

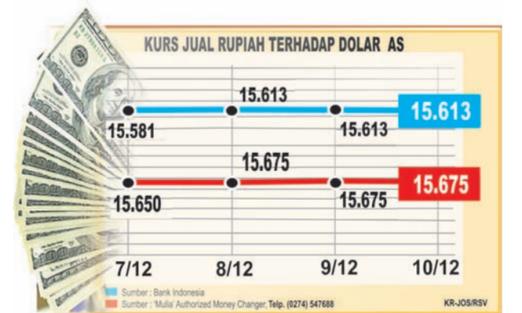
relevan ilmu sosial berkepentingan dan bertujuan. Namun, itu pun ilmu sosial tidak mampu memprediksi apakah situasi akan bisa membaik ke depan. Hingga hari ini, misalnya, ilmu sosial tidak bisa memprediksi apakah dalam lima tahun ke depan korupsi akan berkurang atau tidak. Dengan demikian, prediksi kalkulatif dan metodologis ilmu sosial tentang hal yang akan terjadi di masa depan mensyaratkan stabilitas representasi, populasi, dan sampel yang dijadikan data sesuai hitungan. Suatu spekulasi yang sangat sulit didapatkan karena yang menjadi objek material kajian adalah manusia. Ilmu sosial masih begitu kesulitan memahami suara hati terdalam manusia. Apalagi jika itu kelak menyangkut pilihan-pilihan yang tidak ideologis, rasa suka dan tidak suka, atau karena pengaruh-pengaruh sosial dan politik tertentu. Akan tetapi, sebagai misal lagi, peristiwa mencoblos pilihan presiden dan wakil presiden atau juga anggota parlemen, adalah peristiwa beberapa detik yang tidak seorang pun tahu dan bisa memprediksi

peristiwa yang akan terjadi. Terdapat misteri kekuasaan yang lebih besar. Memang, tentu saja untuk hal-hal permukaan dan pernyataan-pernyataan verbal, bisa saja dikaji dan dihitung bagaimana dalam dan kecenderungan sesuatu sehingga ada beberapa hal yang tetap bisa diprediksi. Semakin ilmu sosial mampu mengatasi dirinya untuk menjangkau hal terdalam dari sisi misterius manusia, semakin ilmu sosial memiliki kemampuan membuka banyak rahasia yang perlu terus menerus untuk digali dan diketahui secara lebih akurat. Itulah sebabnya, penulis masih berharap, terdapat hasil riset elektoral, atau analisis pengamat politik yang kelak akan terbukti benar, minimal dengan kesalahan yang relatif kecil. Jika itu nanti terjadi, maka sebenarnya ilmu sosial masih bisa mempertahankan mutu keilmuannya atas masyarakat dan kehidupan. Situasi itu juga akan mampu menjaga ilmu sosial tetap bermartabat dan dipercaya. (Penulis adalah Kaprodi Magister Sastra FIB UGM)-f

Sambungan hal 1

Meningkat, ...

Risma menambahkan, peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan mental anak-anak dapat berperan penting dalam mencegah kemunculan kasus serupa di masa mendatang. Hal itu, kata Risma, juga dapat menjadi landasan untuk upaya preventif yang lebih baik sehingga bisa memastikan bahwa generasi mendatang dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung secara keseluruhan. (Ant/San)-f



Prakiraan Cuaca					Senin, 11 Desember 2023	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95



Kenaikan Harga Beras dan Lonjakan Impor Beras Jelang Pemilu 2024

Fitri Juniwati Ayuningtyas, S.E., M.Sc.Dev
Sekretaris Prodi Ekonomi Universitas Amikom Yogyakarta

SEKTOR pertanian merupakan sektor yang mampu dalam mendukung perekonomian nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Kebutuhan pangan seperti beras merupakan makanan pokok utama bagi penduduk di wilayah dunia, khususnya Asia. Produsen utama beras adalah Cina dan India yang diikuti oleh negara-negara lain Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Myanmar (FAOSTAT, 2017). Konsumsi beras di Indonesia cukup tinggi sehingga beras menjadi prioritas utama pemerintah terkait kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan dan pertanian. Sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia tidak perlu melakukan impor beras karena sudah dinyatakan swasembada beras sejak 2019 yang artinya negara ini cukup mampu memenuhi kebutuhan beras nasional.

Beras masih menjadi isu penting di Indonesia. Pertanyaan yang masih sering muncul adalah apakah impor merupakan solusi utama dalam mengatasi permasalahan beras. Kebijakan impor pangan, terkadang tidak lepas dari kepentingan politik yang dapat berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Kebijakan yang terjadi di sektor pangan ini dapat dipengaruhinya pula oleh kepentingan kelompok, yakni kelompok pertanian/pedesaan dan kepentingan industri/perkotaan (Islam, 2014). Menurut teori ekonomi, konsep kebijakan ketersediaan pangan dapat teratasi melalui mekanisme pasar. Mekanisme pasar mampu menciptakan efisiensi ekonomi berupa akses, ketersediaan maupun harga. Kebijakan impor beras merupakan bagian dari efisiensi ekonomi beras yang dapat membuka peluang impor yang bertujuan menekan harga pangan dalam negeri.

Di lain sisi keputusan impor beras juga masih menjadi perdebatan oleh beberapa kementerian dan pemerintah yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, BULOG, dan BPS. Arah kebijakan dan opini-opini yang berbeda berdampak pada tidak konsistennya keputusan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Keputusan impor beras diharapkan mampu membuat harga beras impor menjadi lebih rendah dari harga beras dalam negeri. Namun ternyata, harga jual beras di Indonesia masih diatas harga beras di negara lain. Kenaikan harga beras di Indonesia mendorong pada peningkatan kemiskinan dan malnutrisi karena masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah cenderung tidak mampu membayar lebih tinggi harga beras tersebut.

Tercatat fenomena impor beras ini dilakukan selama bertahun-tahun terutama saat berlangsungnya tahun politik yaitu tahun 2003, 2008, 2013, 2018 dan 2023. Menjelang pemilu 2024, lonjakan impor beras terjadi kembali karena pemerintah berencana melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton pada 2023. Kebijakan impor beras menjelang Pemilu pada Februari 2024 tentunya menimbulkan berbagai asumsi karena sebenarnya kebijakan impor ini menyebabkan efek ketergantungan Indonesia terhadap produk negara lain. Selain itu hal ini bukan menjadi sebuah solusi bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan. Peran BULOG sebagai stabilisator harga harus mampu menyediakan stok beras secara terus menerus guna menghindari pasokan beras yang semakin menipis dan cadangan beras yang semakin habis. Namun kebijakan impor ini dinilai sebagai upaya untuk memperoleh dana guna membiayai kebutuhan partai dalam menghadapi pemilu 2024. Kebijakan dari sisi produksi

2023. Menjelang pemilu 2024, lonjakan impor beras terjadi kembali karena pemerintah berencana melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton pada 2023. Kebijakan impor beras menjelang Pemilu pada Februari 2024 tentunya menimbulkan berbagai asumsi karena sebenarnya kebijakan impor ini menyebabkan efek ketergantungan Indonesia terhadap produk negara lain. Selain itu hal ini bukan menjadi sebuah solusi bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan. Peran BULOG sebagai stabilisator harga harus mampu menyediakan stok beras secara terus menerus guna menghindari pasokan beras yang semakin menipis dan cadangan beras yang semakin habis. Namun kebijakan impor ini dinilai sebagai upaya untuk memperoleh dana guna membiayai kebutuhan partai dalam menghadapi pemilu 2024. Kebijakan dari sisi produksi

2023. Menjelang pemilu 2024, lonjakan impor beras terjadi kembali karena pemerintah berencana melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton pada 2023. Kebijakan impor beras menjelang Pemilu pada Februari 2024 tentunya menimbulkan berbagai asumsi karena sebenarnya kebijakan impor ini menyebabkan efek ketergantungan Indonesia terhadap produk negara lain. Selain itu hal ini bukan menjadi sebuah solusi bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan. Peran BULOG sebagai stabilisator harga harus mampu menyediakan stok beras secara terus menerus guna menghindari pasokan beras yang semakin menipis dan cadangan beras yang semakin habis. Namun kebijakan impor ini dinilai sebagai upaya untuk memperoleh dana guna membiayai kebutuhan partai dalam menghadapi pemilu 2024. Kebijakan dari sisi produksi